

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENURUNAN STUNTING  
DI KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Fira Pebrianti

NPP. 31.0590

Asdaf Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Studi Kebijakan Publik

Email: [firapebrianti222@gmail.com](mailto:firapebrianti222@gmail.com)

Pembimbing Skripsi: Vinda Verina KDP, S.STP., M.Tr.IP

**ABSTRACT**

***Problem Statement/Backround (GAP):***

*West Kalimantan Province is one of the 10 provinces with the highest national stunting rate in 2022. In West Kalimantan province, one of the areas experiencing the highest increase in the prevalence of stunted toddlers in 2022 is Kapuas Hulu Regency. Jongkong occupies the first position with the highest percentage of children experiencing stunting in Kapuas Hulu Regency in 2021, where 39.4% of the total number of children who are measured is 1,773 thousand people who experience stunting. **Purpose:** The Purpose of this study is to analyze Collaborative Governance in Reducing Stunting in Jongkong District, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan Province, analyzing the determinant factors (supporting and inhibiting factors) in Collaborative Governance in Reducing Stunting in Jongkong District, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan Province, and analyzing the efforts made carried out to reduce stunting in Jongkong District, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan Province. **Method:** In this study, the researcher used descriptive qualitative research using Ansell and Gash's (2008) Grand Theory. In general, data collection techniques can be divided into several groups, namely direct observation techniques, interview techniques and documentation techniques. Based on research on 15 indicators in 4 (four) dimensions by Ansell and Gash (2008), in their research on the acceleration of stunting reduction, it has been going well. **Result:** Collaborative Governance in reducing stunting in Jongkong District, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan Province has been going well as can be proven from research that refers to the indicators and dimensions proposed by Ansell and Gash (2008) where of the 15 indicators in the four dimensions of collaborative governance in reducing stunting In Jongkong District, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan Province, there were 11 successful indicators and four unsuccessful indicators. **Conclusion:** The success of the 11 indicators in Ansell and Gash's (2008) theory shows that collaboration has gone well in Jongkong District regarding stunting. However, researchers found other factors that caused the stunting rate in Jongkong to increase, namely external factors such as poor parenting patterns, inappropriate provision of PMT and inadequate exclusive breastfeeding.*

**Keywords:** Collaborative Governance, Stunting, SK TPPS

## ABSTRAK

### **Permasalahan/Latar Belakang (GAP):**

Provinsi Kalimantan Barat menjadi salah satu provinsi yang masuk 10 provinsi dengan angka *stunting* tertinggi nasional di tahun 2022. Di provinsi Kalimantan Barat salah satu daerah yang mengalami peningkatan prevalensi balita *stunting* tertinggi di tahun 2022 adalah Kabupaten Kapuas Hulu. Jongkong menempati posisi pertama dengan presentase jumlah anak yang mengalami *stunting* tertinggi di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021, dimana sebesar 39,4% dari total baduta yang diukur sebanyak 1.773 ribu jiwa yang mengalami *stunting*. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah menganalisis *Collaborative Governance* dalam Penurunan *Stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, menganalisis faktor determinan (faktor pendukung dan penghambat) pada *Collaborative Governance* dalam Penurunan *Stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam penurunan *stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. **Metode:** Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan Grand Theory Ansell and Gash (2008). Secara umum teknik pengumpulan data dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu teknik observasi langsung, teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Berdasarkan penelitian terhadap 15 indikator dalam 4 (empat) dimensi oleh Ansell and Gash (2008) dalam penelitiannya tentang percepatan penurunan *stunting* sudah berjalan dengan baik. **Hasil/Temuan:** *Collaborative Governance* dalam penurunan *stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik yang dapat dibuktikan dari penelitian yang mengacu pada indikator dan dimensi yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2008) dimana dari 15 indikator dalam empat dimensi *collaborative governance* dalam penurunan *stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat terdapat 11 indikator yang berhasil dan empat indikator yang belum berhasil. **Kesimpulan:** Keberhasilan 11 indikator dalam teori Ansell and Gash (2008) menunjukkan kolaborasi sudah berjalan dengan baik di Kecamatan Jongkong terkait *stunting*. Namun, Peneliti menemukan faktor lain yang menyebabkan angka *stunting* di Jongkong mengalami kenaikan yaitu adanya faktor eksternal seperti pola asuh orang tua yang kurang, pemberian PMT yang tidak tepat sasaran dan pemberian ASI eksklusif yang kurang.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, *Stunting*, SK TPPS

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

*Stunting* identik dengan kurang gizi, pendek (kerdil) dan ditandai dengan melambatnya pertumbuhan. Dewasa ini, *stunting* menjadi permasalahan nasional maupun internasional. Permasalahan *stunting* umumnya dialami oleh negara-negara miskin dan berkembang. Indonesia termasuk negara berkembang yang tidak lepas dari masalah *stunting*. *Stunting* terjadi karena kurangnya gizi pada saat bayi sejak kandungan hingga bayi tersebut lahir. Pada hal ini gizi ibu hamil yang kurang dapat mengakibatkan kemungkinan bayi lahir mengalami *stunting* yang dapat teridentifikasi pada saat bayi berusia 2 (dua) tahun, (Aurima et al., 2021). Penyebab utama terjadinya *stunting* ada 4 (empat) yaitu faktor domestik (keluarga), gizi kurang optimal, pemberian ASI yang tidak eksklusif dan kejadian infeksi. Anak kecil menerima makanan dan gizi yang tidak memadai karena tertundanya inisiasi menyusui dini, pemberian ASI yang tidak eksklusif dan praktik penyapihan dini, serta akses yang kurang optimal terhadap layanan kebersihan dasar (jamban, akses terhadap air bersih, dan kejadian diare), (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Berdasarkan pada laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 yang menyebutkan bahwa sebanyak 21,6% balita di Indonesia menderita stunting. Adapun 10 Provinsi dengan kasus *stunting* terbanyak secara nasional pada tahun 2022 diantaranya: Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Papua, Nusa Tenggara Barat, Aceh, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan. Dilansir dari sumber berita kalbarprov.go.id pada tahun 2023 prevelensi stunting di provinsi Kalimantan Barat sangat tinggi dan diatas nasional. Pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing prevelensi stuntingnya diantara 29,8% dan 27,8% yang termasuk kategori tinggi menurut WHO yakni 20-30%. Sehingga ditargetkan pada tahun 2023 mencapai 23% dan dapat mencapai 14% pada tahun 2024 sesuai target RPJMN 2020-2024. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kalimantan Barat mengingat masalah *stunting* ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya. Di provinsi Kalimantan Barat salah satu daerah yang mengalami peningkatan prevelensi balita *stunting* tertinggi di tahun 2022 adalah Kabupaten Kapuas Hulu dengan peningkatan sebesar 9% lebih besar dibandingkan Kabupaten Melawi yang hanya mengalami peningkatan sebesar 6,9%. Dimana pada sumber berita dari infokapuashulu.go.id pada tahun 2020 hingga 2022 prevelensi *stunting* di Kabupaten Kapuas Hulu di tahun 2020 sebesar 32,9%, sementara pada tahun 2021 di angka 31,24% dan pada tahun 2022 di angka 28,9%.

Menurut Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2021, jumlah anak usia bawah dua tahun (baduta) yang menderita stunting sebanyak 1.773 ribu jiwa dari jumlah baduta yang diukur sebanyak 6.424 ribu jiwa, artinya satu dari tiga jumlah baduta di Kabupaten Kapuas Hulu yang diukur menderita *stunting*. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kapuas Hulu Tahun 2021, Kecamatan Jongkong menempati posisi pertama dengan presentase jumlah anak yang mengalami *stunting* tertinggi di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2021, dimana sebesar 39.4% kategori sangat tinggi menurut WHO dari total baduta yang diukur sebanyak 1.773 ribu jiwa yang mengalami *stunting* di Kabupaten Kapuas Hulu. Tingginya angka *stunting* di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kecamatan Jongkong pada anak bawah dua tahun (baduta) sehingga perlu upaya penurunan *stunting* yang melibatkan berbagai stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah. Menjawab permasalahan diatas, pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kapuas Hulu sebagai tindaklanjut dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* secara nasional. Dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan upaya penurunan *stunting* perlu dilakukan kerja sama antar unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Berdasarkan latar belakang Jongkong menempati posisi pertama dengan angka *stunting* tertinggi di Kabupaten Kapuas Hulu. Walaupun Kecamatan Jongkong merupakan penghasil ikan dan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan namun masih banyak anak penderita *stunting* di Kecamatan Jongkong. Sebagai daerah dengan mata pencaharian nelayan dan serta penghasil ikan kedua terbanyak di Kabupaten Kapuas Hulu. Kecamatan Jongkong seharusnya dapat memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya. Jongkong sebagai daerah penghasil ikan dan *stunting* tertinggi di Kabupaten Kapuas Hulu menjadi latar belakang dalam percepatan penurunan angka *stunting* sehingga Bupati Kapuas Hulu mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting*.

### 1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saufi (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Dinamika *Collaborative Governance* dalam Penanggulangan *Stunting* Ditengah Pandemi Covid-19”. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dinamika *collaborative governance* dari Emerson, Nabatchi dan Balogh (2012). Hasil penelitian ini, peneliti menemukan masih adanya kesenjangan. Kesenjangan ini diidentifikasi dari temuan data Pemerintah masih memainkan peran dominan dan implementasinya yang lambat. Kesenjangan terlihat jelas pada indikator keberhasilan kerjasama, yaitu kesepakatan institusi ditandai masih sebatas komitmen bersama tanpa dielaborasi secara mendalam keberpihakan di masing-masing *stakeholder* dan capaian kinerjanya. Kedua penelitian yang dilakukan oleh Virginia Elvira Dey Putri (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Percepatan Penanggulangan *Stunting* di Kecamatan Alak Kota Kupang”. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Grand Teory Edward III. Hasil penelitian ini, peneliti menemukan dari 11 indikator dengan 4 (empat) dimensi yang ditemukan oleh Edward III, ditemukannya 8 (delapan) indikator keberhasilan yang dicapai oleh Kecamatan Alak Kota Kupang dalam hal percepatan penanggulangan *stunting*. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Gregorius Giri Surya Pratama (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Peran Aktor Dalam Percepatan Penurunan Prevalensi *Stunting* Di Kelurahan Kutowinangun Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif teori pertukaran Peter M Blau tentang peran aktor dalam mengurangi prevalensi di Kelurahan Kutowinangu Lori. Hasil yang ditemukan oleh peneliti bahwa adanya kejelasan peran antar aktor yaitu pihak eksternal (Kelurahan, Kelsi, TPK, KSI, dan Lembaga terkait) dengan pihak internal (Keluarga) dalam hal bersama-sama menurunkan angka prevelensi *stunting* di Kelurahan Kutowiangun Lor. Keempat penelitian yang dilakukan oleh Norsanti (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Program Percepatan Penurunan *Stunting* di Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi)”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model dari Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan program percepatan penurunan *stunting* pada Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan (Studi Kasus pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar) cukup efektif dalam menurunkan jumlah balita *stunting*. Kelima penelitian yang dilakukan oleh Usman U et al., (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Program Penanganan *Stunting* di Wilayah Kerja Puskesmas Baraka”. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian yang dikemukakan bahwa pelaksanaan program penanganan *stunting* di Wilayah Kerja Puskesmas Baraka belum optimal, masih banyak ditemukannya kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

### 1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Adapun kebaruan pada penelitian ini dengan kelima penelitian terdahulu diatas, terletak pada fokus peneliti mengenai kolaborasi pemerintah dalam hal menurunkan *stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, sedangkan penelitian terdahulu fokusnya mengenai dinamika, implementasi, analisis peran, efektivitas dan evaluasi *stunting* dengan lokos yang berbeda dengan peneliti.

## 1.5 Tujuan.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis *Collaborative Governance* dalam Penurunan *Stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, menganalisis faktor determinan (faktor pendukung dan penghambat) pada *Collaborative Governance* dalam Penurunan *Stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam penurunan *stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

## II. METODE

Metode penelitian terbagi ke dalam dua jenis, yakni metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif. Menurut Creswell (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka teoretis, dimana dalam mempelajari masalahnya peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk penyelidikan dan pengumpulan data.

Penelitian kualitatif juga termasuk jenis dari "*field research approach*". Menurut Simangunsong (2017) yaitu teknik pengumpulan data penelitian yang total dilakukan di lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai alat utama pendekatan penelitian dan observasi serta dokumentasi sebagai alat pendukung dari setiap pendekatan penelitian.

W.Creswell & Creswell (2018) juga menjelaskan bahwa "peneliti kualitatif biasanya bekerja dengan pendekatan induktif, membangun pola, kategori, dan tema dari bawah ke atas". Pendekatan induktif ini berarti didasarkan pada fakta yang terjadi di lapangan dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, karena sifatnya yang fleksibel tentu akan memudahkan proses penelitian. Peneliti menggunakan metode deskriptif dalam melakukan penelitian terkait *Collaborative Governance* dalam penurunan *stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu. Metode ini digunakan untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi, gambaran, atau tulisan secara sistematis sesuai dengan fakta di lapangan terkait objek atau peristiwa yang diteliti.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Segala jenis informasi serta data yang didapatkan digabungkan dalam proses penelitian, disesuaikan dengan menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell and Gash (2008). Dalam teori *collaborative governance* yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2008), terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi tersebut. Berikut penjelasan dari setiap faktor yang dapat mempengaruhi kolaborasi pemerintah dalam percepatan penurunan *stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.

### 3.1. Kondisi Awal

Peneliti mengukur keberhasilan tiga indikator *collaborative governance* dimensi kondisi awal dari tiga indikator yaitu kondisi sumber daya dan kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda dan insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan dan indikator riwayat konflik antar pemangku kepentingan di masa lalu.

Pertama, indikator kondisi sumber daya atau kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda bahwa setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi penurunan *stunting* di Kecamatan Jongkong memiliki kekuatan yang berbeda dengan melibatkan pemerintah yang dapat berperan dalam mengeluarkan surat rekomendasi, sedangkan organisasi masyarakat dapat berperan membantu pemerintah dalam pendampingan atau pelatihan kepada masyarakat dalam kapasitas yang berbeda

sesuai pada bidangnya masing-masing. Kondisi antara sumber daya atau kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda membuat peneliti memahami bahwa adanya perbedaan kekuatan pemangku kepentingan ini justru mendorong terjadinya kolaborasi yang efektif dengan menunjukkan adanya sikap saling ketergantungan antar pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan kolaborasi. Hal ini sejalan dengan teori Ansell and Gash (2008) dimana *Collaborative Governance* yang efektif membutuhkan strategi dalam memberdayakan pemangku kepentingan yang kurang beruntung.

Kedua, indikator insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan berdasarkan hasil penelitian adanya beberapa pemangku kepentingan memiliki insentif berupa anggaran dalam keberhasilan suatu program yang dijalankan. Insentif dapat berupa anggaran yang dimiliki oleh pemangku kepentingan maupun reward yang diberikan kepada pelaksana dalam program penurunan *stunting*. Sumber pendanaan *stunting* di Kecamatan Jongkong bersumber dari DAK Non Fisik, APBD, dan dana desa. Begitu juga dengan pelaksana kebijakan seperti kader posyandu mendapatkan insentif sebesar Rp.750.000 per tahun yang pemberiannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap.

Ketiga, indikator riwayat konflik berdasarkan hasil penelitian adanya kolaborasi yang terjadi pada masa lalu belum terorganisir dengan baik dan jarang melibatkan semua pihak. Artinya kolaborasi di masa lalu masih mengedepankan egosektoral. Selain itu, ada pihak yang belum aktif dalam memberikan data-data maupun informasi terhadap pemangku kepentingan yang lain yang terjadi pada kolaborasi di masa lalu. Adanya riwayat konflik di masa lalu dapat mengurangi tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang lain.

Kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian tiga indikator *collaborative governance* dimensi kondisi awal dari tiga indikator, dua indikator yang berhasil yaitu kondisi sumber daya dan kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda dan insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan. Sementara indikator riwayat konflik antar pemangku kepentingan di masa lalu dinilai tidak berhasil karena memiliki riwayat konflik dilihat dari penjelasan informan adanya egosektoral di masa lalu. Akibat adanya riwayat konflik dimasa lalu dapat mengurangi kepercayaan pemangku kepentingan dalam berkolaborasi.

### 3.2 Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan berkaitan dengan protokol dasar dan aturan dasar yang jelas dan bersifat prosedural dari proses kolaboratif. Desain kelembagaan yang tepat dan jelas dapat meyakinkan para pemangku kepentingan terkait regulasi yang dapat dipercaya dalam berkolaborasi. Terdapat 4 (empat) indikator yang mempengaruhi dimensi desain kelembagaan yaitu partisipasi inklusif, forum komunikasi, peraturan dasar yang jelas, dan transparansi proses.

Pertama, indikator partisipasi inklusif ini lebih ditekankan pada peran pemerintah untuk mengajak pemangku kepentingan dari non pemerintah agar turut serta dalam suatu kolaborasi yang terjadi.

**Tabel 1.**  
Pihak yang Terlibat dalam Penurunan *Stunting* di Kecamatan Jongkong

Aktor	Lembaga/Instansi
(1)	(2)
	1. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2. Pihak Kecamatan
	3. Pemerintah Desa
	4. Puskesmas
	5. Polsek

(1)	(2)
	6. Danramil
	7. KUA
Swasta	-
Perguruan Tinggi	-
Organisasi Masyarakat	1. Kader Posyandu
	2. PKK

Sumber: Hasil Wawancara, Diolah oleh Peneliti, 2024

Berdasarkan **Tabel 1** aktor yang terlibat dalam intervensi penurunan *stunting* melibatkan aktor pemerintah seperti Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah desa, Puskesmas, Danramil, KUA, dan Polsek. Sementara untuk aktor dari masyarakat seperti PKK dan kader posyandu. Tidak adanya keterlibatan pihak akademisi dan pelaku usaha dalam kegiatan intervensi penurunan *stunting*. Seharusnya sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kapuas Hulu harus melibatkan pihak akademisi dan pelaku usaha. Sehingga peneliti menilai indikator partisipasi inklusif belum optimal.

Kedua, indikator forum komunikasi merupakan suatu wadah untuk menyampaikan atau bertukar informasi antar pemangku kepentingan agar mempermudah pertukaran informasi. Forum komunikasi dapat berbentuk *WhatsApp Group* atau media lainnya. Berdasarkan hasil penelitian indikator forum komunikasi antar pemangku kepentingan dalam penelitian ini berbentuk *Whatsapp Group* yang dinilai lebih efektif dan efisien. Selain *Whatsapp Group*, ada juga yang masih menggunakan surat undangan atau berbentuk tulisan. Sehingga indikator forum komunikasi dalam *Collaborative Governance* di Kecamatan Jongkong sudah berhasil.

Ketiga, indikator peraturan dasar yang jelas. Dalam hal ini, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* sebagai landasan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting* serta diperkuat dengan keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 209 tahun 2022 memuat pembentukan tim khusus kepada suatu badan yang disebut Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan intervensi dalam penurunan angka *stunting*. Hal ini didukung dengan adanya SK TPPS di tingkat kabupaten. Namun, di tingkat kecamatan khususnya di kecamatan Jongkong belum adanya SK TPPS. Seharusnya sebelum berkolaborasi sudah diselenggarakannya SK TPPS ditingkat kecamatan tersebut. Sehingga peneliti menilai bahwa indikator peraturan dasar yang jelas belum optimal.

Keempat, indikator transparansi proses. Transparansi artinya bersifat terbuka yang mudah diakses oleh semua orang yang membutuhkan informasi. Dalam hal ini, informasi terkait *stunting* dapat diakses pada portal berita resmi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu yaitu <http://info.kapuashulukab.go.id/>. Selain itu, informasi mengenai kegiatan dalam penurunan *stunting* dapat diakses melalui website resmi Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu maupun instagram Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Kesimpulan dari pemaparan hasil penelitian empat indikator *collaborative governance* dimensi desain kelembagaan dimana dua indikator dianggap berhasil yaitu indikator forum komunikasi dan transparansi proses dimana kedua indikator menunjukkan keberhasilan yaitu adanya forum komunikasi yang berbentuk *Whatsapp Group* dan transparansi proses melalui website resmi Dinkes dalam pemberian informasi terkait *stunting*. Sementara, indikator partisipasi inklusif dan peraturan dasar yang jelas dianggap belum berhasil dikarenakan dari indikator partisipasi inklusif belum adanya keterlibatan

pihak akademisi dan pelaku usaha dimana dalam hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting di Kabupaten Kapuas Hulu.

### 3.2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif merupakan salah satu dimensi keberhasilan collaborative governance. Dimana peran pemimpin dalam berkolaborasi sangat dibutuhkan. Pemimpin kolaboratif disini sebagai pelayan proses (transformasi, pelayan, atau fasilitatif kepemimpinan) yang gaya kepemimpinannya ditandai dengan fokusnya pada promosi dan menjaga proses. Terdapat tiga indikator dalam menentukan keberhasilan dimensi kepemimpinan fasilitatif yaitu sebagai berikut.

Pertama, indikator manajemen atau mengelola suatu proses kolaborasi. Dalam hal ini, suatu kolaborasi harus mempunyai dasar hukum. Adanya surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor Nomor 209 tahun 2022 memuat pembentukan tim khusus kepada suatu badan yang disebut Tim Percepatan Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan intervensi dalam penurunan angka *stunting* sebagai dasar hukum dalam melakukan kolaborasi. Dari segi anggaran bersumber dari DAK, APBD dan dana desa serta adanya anggaran dari tiap OPD untuk *stunting*. Selain itu, jumlah staf di Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah memadai dan berkompeten dibidangnya seperti adanya tenaga *nutrisionis* dan penyuluh kesmas. Sementara untuk tenaga posyandu dan bidan bayi di Desa Jongkong Kiri Tengah sudah cukup memadai seperti kader posyandu berjumlah 10 orang dan untuk bidan bayi ada 3 (tiga) orang. Sehingga terkait dengan indikator manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi peneliti menilai sudah cukup baik.

Kedua, indikator indikator *collaborative governance* dimensi kepemimpinan fasilitatif yaitu mampu mengelola pelaksanaan kredibilitas yang bersifat teknis. Terkait teknis penurunan *stunting* yang berkaitan dengan intervensi spesifik seperti pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil dan remaja putri, promosi dan konseling tentang *stunting*, promosi dan konseling tentang ibu menyusui, PMBA, suplemen gizi dikelola oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melalui pihak puskesmas dan dibantu kader posyandu.

**Tabel 2.**

Tenaga Kerja berdasarkan jumlah dan kualifikasi Pendidikan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021

No	Jenis Tenaga	PNS	Kontrak	NS	Magang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Dokter Umum	28	29	1		58
2	Dokter Gigi	2	2			4
3	Dokter Spesialis	5	5			10
4	Perawat	304	291	13	105	713
5	Perawat Gigi	27	5		10	42
6	Bidan	223	133	22	80	458
7	Pranata Laboratorium	32	14	3	1	50
8	Farmasi	30	15	3		48
9	Perekam Medis	2	10		2	14
10	Penyuluh Kesmas	28	27	4	6	65
11	Apoteker	10	9	2	1	22
12	Fisioterapi	4	2			6
13	Nutrisionis	33	11	14	1	59

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Radiografer	4	4			8
15	Sanitarian	9	3	7	1	30
16	Tenaga Lainnya	110	184		9	303
17	Elektromedis	1				1
<b>Jumlah</b>						<b>1891</b>

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan PP dan KB, 2022

Berdasarkan **Tabel 2** indikator pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis penurunan *stunting* sudah berhasil dikelola oleh Dinas Kesehatan dengan jumlah tenaga PNS yang mendominasi yang artinya tingkat pendidikannya minimal S1. Sementara, khusus di Kecamatan Jongkong sebagai pengelola pelaksanaan kredibilitas teknis sebagai perpanjangan program dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam hal penurunan *stunting* ada pada puskesmas dan kader posyandu yang memberikan intervensi spesifik. Sehingga indikator pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis dinilai sudah berjalan dengan baik.

Ketiga, indikator kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel. Dalam hal ini, Wakil Bupati Kapuas Hulu sebagai ketua pelaksana sesuai dengan surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 209 tahun 2022, sudah menjalankannya dalam hal pengambilan keputusan dalam setiap Rapat Koordinasi pertemuan antara pemangku kepentingan maupun rapat evaluasi hasil PSG. Pengambilan keputusan pada saat Rapat Koordinasi maupun evaluasi hasil PSG dalam menentukan upaya yang akan dilakukan dan dibantu dengan adanya saran, serta solusi dari instansi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sehingga dapat meyakinkan aktor yang lain. Sehingga peneliti menilai indikator memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan semua aktor sudah berhasil.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dimensi kepemimpinan fasilitatif dalam berkolaborasi dalam penurunan *stunting* menunjukkan pemimpin sudah memfasilitasi dengan baik dibuktikan dengan ketiga indikator dimensi kepemimpinan fasilitatif yang mendukung dalam berkolaborasi.

### 3.3 Proses Kolaboratif

Pada dimensi ini merupakan hal yang sangat penting dalam model collaborative governance dimana proses yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta menumbuhkan rasa saling percaya dan membangun komitmen dalam perencanaan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sehingga terciptanya suatu visi misi dan kesamaan dalam tujuan berkolaborasi. Dimensi proses kolaboratif memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya diantaranya indikator dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, saling memahami dan indikator membangun kepercayaan, dan hasil sementara.

Pertama, indikator dialog tatap muka disini peneliti menemukan salah satu program yang dilakukan secara rutin oleh pemangku kepentingan yaitu kegiatan *rembuk stunting* yang dilaksanakan sekali dalam setahun setiap desa di Kecamatan Jongkong. Kegiatan rembuk *stunting* diikuti berbagai pemangku kepentingan seperti pihak kecamatan, pemerintah desa, puskesmas, kader posyandu, PKK, KUA, Danramil dan Polsek serta turut mengundang pihak Dinkes. Sehingga peneliti menilai indikator dialog tatap muka sudah berhasil.

Kedua, indikator membangun kepercayaan kaitannya dengan transparansi proses. Dimana dalam hal membangun kepercayaan seperti menerima informasi maupun data dengan mudah dari pemangku kepentingan yang lain yang memberikan informasi. Informasi dan data dapat mudah diakses oleh seluruh pembaca di website resmi Dinas kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Berdasarkan hasil penelitian indikator membangun kepercayaan pihak pemerintah sudah cukup baik dalam hal pemberian informasi yang mudah diakses oleh masyarakat sehingga masyarakat percaya adanya keterbukaan informasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemberian informasi juga didapatkan oleh masyarakat dari pemerintah melalui sosialisasi. Sehingga indikator membangun kepercayaan dinilai sudah berjalan dengan baik.

Ketiga, indikator komitmen disini sama halnya dengan memberikan kepercayaan kepada sesama pemangku kepentingan untuk tujuan bersama selama berkolaborasi. Keterlibatan aktor dalam mengikuti setiap kegiatan memiliki peran penting dalam membangun suatu komitmen sesama pemangku kepentingan. Komitmen ini dapat berupa aturan maupun komitmen dari Kepala Daerah. Adanya komitmen dari pimpinan bupati dan wakil bupati dalam visi misinya yang dibuktikan dengan adanya surat keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 209 tahun 2022 tentang Pembentukan TPPS dalam komitmennya menurunkan angka stunting di Kabupaten Kapuas Hulu.

**Tabel 3.**  
Keterlibatan Aktor Dalam Intervensi Penurunan *Stunting* di Kecamatan Jongkong

Program	Pihak Terlibat	Jenis
Spesifik	1. Dinas Kesehatan PP dan KB melalui pihak Puskesmas 2. Pemerintah Desa melalui kader posyandu	Pemberian PMT lokal
	Dinas Kesehatan PP dan KB melalui Puskesmas	1. Pemberian tablet tambah darah 2. Promosi dan konseling tentang stunting 3. Promosi dan konseling tentang ibu menyusui 4. PMBA 5. Suplemen gizi termasuk pemberian Vitamin A
Sensitif	Pihak Kecamatan, PKK Danramil, Polsek dan KUA	Memberikan edukasi kepada remaja

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024

Berdasarkan **Tabel 3** adanya komitmen antar pemangku dalam menurunkan angka stunting khususnya di Kecamatan Jongkong. Komitmen itu terus dilaksanakan dengan melakukan intervensi spesifik maupun sensitif dalam percepatan penurunan stunting seperti melakukan kegiatan rembuk stunting secara rutin tiap bulannya di setiap desa, kegiatan posyandu dan pemberian PMT yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemangku kepentingan. Sehingga indikator komitmen terhadap proses dinilai sudah berjalan dengan baik.

Keempat, indikator saling memahami disini maksudnya para pemangku kepentingan harus saling memahami maksud dan tujuan yang sebenarnya serta peran masing-masing dari pemangku kepentingan sehingga dapat menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Peran dari masing-masing pemangku kepentingan dapat dilihat pada keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor Nomor 209 tahun 2022 memuat pembentukan tim khusus kepada suatu badan yang disebut Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan intervensi dalam penurunan angka stunting di seluruh kecamatan dan desa di Kapuas Hulu termasuk Kecamatan Jongkong dengan angka stunting tertinggi.

Kelima, indikator hasil sementara ataupun *output* dari koaborasi. Proses kolaborasi yang dilaksanakan bisa bernilai positif maupun tidak ada kemajuan. Hasil sementara dapat dilihat dari prevelensi *stunting* yang cenderung turun atau mengalami kenaikan.

**Tabel 4.**

Prevelensi *Stunting* di Kecamatan Jongkong Berdasarkan PSG Tahun 2021-2023

No	Kategori	Prevalensi <i>Stunting</i>		
		2021	2022	2023
1.	Baduta	39.4%	31.7%	41.03%
2.	Balita	39.6%	38.2%	36.9%

Sumber: Dinas Kesehatan PP dan KB, 2023

Berdasarkan **Tabel 4** prevensi *stunting* di Jongkong mengalami kenaikan pada baduta *stunting* mengalami kenaikan angka *stunting* sebesar 9,33%. Sementara balita *stunting* mengalami penurunan 1,3% tidak menunjukkan hasil yang signifikan. Indikator hasil sementara untuk *stunting* di kecamatan Jongkong menunjukkan kenaikan angka *stunting* di tahun 2023 yang artinya kolaboarasi yang terjadi belum dapat menurunkan angka *stunting* di Kecamatan Jongkong.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 (empat) indikator berhasil dari dimensi proses kolaboratif yaitu indikator dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, saling memahami dan indikator membangun kepercayaan. Sementara indikator hasil sementara dianggap tidak berhasil karena angka *stunting* di Kecamatan Jongkong mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

### 3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan program penurunan *stunting* terus dilaksanakan oleh para pemangku kepentingan baik dari pemerintah maupun non-pemerintah yang berkolaborasi dalam penurunan *stunting* disetiap daerah sehingga angka *stunting* di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Peneliti menemukan temuan penting yakni dalam kolaborasi yang terjadi lebih besar peran pemerintah dimana di tingkat kabupaten partisipasi hanya bersifat antar Organisasi Perangkat Daerah saja tidak adanya peran dari pihak akademisi, pelaku usaha maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Begitu juga di tingkat kecamatan aktor yang terlibat dalam intervensi penurunan *stunting* melibatkan aktor pemerintah seperti Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemerintah desa, Puskesmas, Danramil, KUA, dan Polsek. Sementara untuk aktor dari masyarakat seperti PKK dan kader posyandu. Tidak adanya keterlibatan pihak akademisi dan pelaku usaha dalam kegiatan intervensi penurunan *stunting*. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan peran pemerintah yang dominan, layaknya temuan Ahmad Saufi (Ahamd Saufi, 2021).

### 3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan faktor penghambat lainnya seperti adanya faktor eksternal yaitu ketidaktepatan dalam pola asuh orang tua yang seharusnya PMT untuk anak *stunting*, namun diberikan kepada saudaranya atau dimakan oleh orang tua. Penyebab lainnya yaitu kurangnya pemberian ASI eksklusif.

### 3.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Penurunan *Stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Jongkong dan Dinas Kesehatan Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 11 faktor pendukung keberhasilan percepatan penanggulangan stunting antara lain kondisi sumberdaya dan kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda, insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, forum komunikasi, manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan semua aktor, dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, transparansi proses, membangun kepercayaan, dan saling memahami. Faktor pendukung lainnya seperti adanya program jemput bola untuk anak dan orang tua untuk keposyandu, program dashat (dapur sehat atasi *stunting*), dan PMT lokal. Adapun 4 (empat) faktor penghambat keberhasilan penurunan stunting di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yaitu partisipasi inklusif, riwayat konflik atau kerjasama antar pemangku kepentingan di masa lalu, peraturan dasar yang jelas, dan hasil sementara. Faktor penghambat lainnya seperti pola asuh orang tua yang kurang, pemberian PMT yang tidak tepat sasaran dan pemberian ASI eksklusif yang kurang.

### **3.7 Upaya yang dilakukan Pemerintah dalam Penurunan Stunting di Kecamatan Jongkong**

Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksana kebijakan di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan 4 (empat) indikator belum berhasil yaitu:

1. Melibatkan masyarakat dalam program penurunan stunting
2. Selalu melibatkan semua aktor dalam proses kolaborasi
3. Menyelenggarakan SK TPPS tingkat Kabupaten
4. Melakukan intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan untuk anak stunting
5. Memberikan edukasi kepada orang tua anak yang mengikuti kegiatan posyandu

## **IV. KESIMPULAN**

*Collaborative Governance* dalam penurunan *stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat sudah berjalan dengan baik yang dapat dibuktikan dari penelitian yang mengacu pada indikator dan dimensi yang dikemukakan oleh Ansell and Gash (2008). Berdasarkan penelitian dari 15 indikator dalam empat dimensi *collaborative governance* dalam penurunan *stunting* di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat terdapat 11 indikator yang berhasil yaitu kondisi sumberdaya dan kekuasaan pemangku kepentingan yang berbeda, insentif yang dimiliki para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi, forum komunikasi, manajemen yang cukup terhadap proses kolaborasi, pengelolaan kemampuan melaksanakan kredibilitas teknis, memastikan kolaborasi diberdayakan untuk membuat keputusan yang kredibel dan meyakinkan semua aktor, dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, transparansi proses, membangun kepercayaan, dan saling memahami. Adapun 4 (empat) faktor penghambat keberhasilan penurunan stunting di Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat yaitu partisipasi inklusif, riwayat konflik atau kerjasama antar pemangku kepentingan di masa lalu, peraturan dasar yang jelas, dan hasil sementara. Faktor pendukung lainnya seperti:

1. Adanya program jemput bola untuk anak dan orang tua untuk mengikuti kegiatan posyandu
2. Program dashat (dapur sehat atasi *stunting*)
3. Jenjang Pendidikan Pegawai Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

4. SK TPPS Kabupaten Kapuas Hulu
5. Dana Insentif bagi Kader Posyandu
6. PMT lokal

Adapun tiga faktor penghambat lainnya dalam penurunan stunting yaitu:

1. Pola asuh orang tua yang kurang
2. Pemberian PMT yang tidak tepat sasaran
3. Pemberian ASI eksklusif yang kurang

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan pelaksana kebijakan di Kecamatan Jongkong berdasarkan 4 (empat) indikator yang belum berhasil yaitu:

1. Melibatkan masyarakat dalam program penurunan stunting
2. Selalu melibatkan semua aktor dalam proses kolaborasi
3. Menyelenggarakan SK TPPS tingkat Kabupaten
4. Melakukan intervensi gizi spesifik seperti pemberian makanan tambahan untuk anak stunting
5. Memberikan edukasi kepada orang tua anak yang mengikuti kegiatan posyandu

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu, jarak dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dilokus yang sama dan diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih memperluas penelitian jaringan antar aktor untuk menentukan aktor mana yang paling berperan dalam percepatan penurunan stunting.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kecamatan Jongkong yang sudah memberikan kontribusi kepada peneliti dalam penyelesaian penelitian ini. Kepada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat dan masukan positif selama proses menyusun penelitian ini. Dan kepada seluruh pihak yang berkontribusi memberikan masukan dan bantuan dalam penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Aurima, J., Susaldi, S., Agustina, N., Masturoh, A., Rahmawati, R., & Tresiana Monika Madhe, M. (2021). Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Stunting pada Balita di Indonesia. *Open Access Jakarta Journal of Health Sciences*, 1(2), 43–48. <https://doi.org/10.53801/oajjhs.v1i3.23>
- Creswell, J.W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design. (Fourth Edition)*. (FOURTH EDI). SAGE Publication.
- Creswell, J. W & Creswell, J. D. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Fifth Edit)*. SAGE Publications.
- Elvira, V., & Putri, D. (2023). Implementasi Penanggulangan Stunting Di Kecamatan Alak Kota Kupang.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative

- governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.  
<https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Kemkes. (2018). Buletin Jendela–Data dan Informasi Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Diakses tanggal 4 Oktober 2023 dari  
<https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/buletin/Buletin-Stunting-2018.pdf>.
- Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu (2021)
- Laporan Studi Status Gizi Indonesia (2022)
- Norsanti, N. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10.  
<https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825>
- Nur, L. M., & Jutomo, L. (2019). Deteksi Dini Stunting Pada Jemaat Gmim Kapernaum Tenau. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Kepulauan Lahan Kering*, 2234, 87–93.
- Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2018 tentang Penurunan *Stunting* di Kabupaten Kapuas Hulu
- Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
- Saufi, A. (2021). Dinamika collaborative governance dalam penanggulangan stunting ditengah pandemi covid-19. *Prosiding Seminar Nasional Penanggulangan Kemiskinan*, 1(1), 80–95
- Simangunsong, F. (2017). Metode Penelitian Pemerintahan. Bandung: Alfabeta.
- Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor: 209/DKKB/2022 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022-2026

